



Article Informations
Corresponding Email:
cornelia.helena21@gmail.com

Received: 29/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KEPENTINGAN INGGRIS MEMBENTUK *JOINT DEFENCE COOPERATION DIALOGUE* (JDCD) DENGAN INDONESIA DITENGAH EKSISTENSI *FIVE POWER DEFENCE ARRANGEMENTS* (FPDA)

Cornelia Helena Alfianti Tamin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCD) pertama kali dilaksanakan oleh Inggris dan Indonesia pada tahun 2019. Kerjasama JDCD dilaksanakan setiap tahun. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan JDCD antara Indonesia dan Inggris tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024. Dalam melaksanakan kerjasama bilateral JDCD ini, terdapat beberapa kepentingan nasional yang dimiliki oleh Inggris dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan berbagai kepentingan nasional yang dimiliki oleh Inggris dalam melaksanakan JDCD dengan Indonesia dan juga mempertimbangkan latar belakang historis terbentuknya *Five Power Defence Arrangements* (FPDA). Penelitian ini menggunakan pendekatan Neorealisme, konsep Kerjasama Internasional dan konsep Kepentingan Nasional. Beberapa hal yang menjadi kepentingan Inggris dalam menjalin kerjasama pertahanan JDCD dengan Indonesia adalah ingin mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang pertahanan dan keamanan, memperkuat eksistensinya di kawasan Indo-Pasific, dan membangun kepercayaan bagi Indonesia terhadap negara sekutu Inggris.

Kata Kunci : Inggris, Indonesia, Kepentingan Nasional, JDCD, FPDA.

Abstract

The Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCD) was first implemented by the UK and Indonesia in 2019. JDCD cooperation is carried out annually. However, there are several obstacles that prevent the JDCD between Indonesia and the UK from being implemented in 2023 and 2024. In implementing this JDCD bilateral cooperation, there are several national interests held by the UK and Indonesia. This study aims to analyze the various national interests held by the UK in implementing the JDCD with Indonesia and also considers the historical background of the formation of the *Five Power Defence Arrangements* (FPDA). This study uses a Neorealist approach, the concept of International Cooperation and the concept of National Interest. Some of the

things that are in the UK's interests in establishing JDCD defense cooperation with Indonesia are wanting to develop knowledge and capabilities in the field of defense and security, strengthen its presence in the Indo-Pacific region, and build trust for Indonesia towards the UK's ally.

Keywords : UK, Indonesia, National Interest, JDCD, FPDA.

1. Pendahuluan

Five Power Defence Arrangements (FPDA) mulai terbentuk pada tahun 1971 yang beranggotakan lima negara, yaitu Inggris, Selandia Baru, Australia, Malaysia, dan Singapura. FPDA berdiri sebagai dampak dari Inggris yang menarik pasukannya dari Terusan Zues. Pada tahun 1967, Inggris mengeluarkan keputusan untuk menarik pasukannya dari sebelah timur Terusan Zues. Penarikan pasukan tersebut tentu berdampak pula pada penghentian jaminan pertahanan yang diberikan oleh Inggris kepada Malaysia dan Singapura di bawah Perjanjian Pertahanan Inggris-Malaysia atau Anglo-Malayan Defence Agreement (AMDA). Keputusan Inggris tersebut membuat Malaysia dan Singapura khawatir, mengingat dua negara tersebut relatif baru dan tidak sekuat negara-negara tetangga yang cenderung agresif, salah satunya seperti Indonesia.¹ Terlebih Malaysia sempat memiliki konflik dengan Indonesia terkait pembentukan Federasi Malaysia.

Malaysia mengalami kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama awal Malaya. Sebagai negara yang berada dalam satu rumpun, Indonesia menyambut baik kemerdekaan Malaysia tersebut hingga akhirnya timbul rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia pada tahun 1961. Tahun tersebut yang kemudian menjadi awal mula dari konfrontasi antara Indonesia dan Malaya.

Rencana pembentukan Federasi Malaysia tersebut pun melibatkan beberapa negara lainnya, seperti Brunei, Singapura, Sabah, dan Serawak. Rencana tersebut mendapat penolakan dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa Federasi Malaysia ini merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan

¹ Caroline Putri Pratama dan Darang Sahdana Candra, "Perkembangan Five Power Defence Arrangements dalam Menanggapi Dinamika Keamanan Asia Tenggara Pasca Perang Dingin," Jurnal Global. Vol.16 No.1 (2014) Hal.40

kepentingan Indonesia.² Indonesia juga menganggap bahwa tujuan didirikannya Federasi Malaysia ini adalah untuk melindungi kepentingan Inggris di Asia Tenggara. Pada 30 Desember 1961, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembentukan Federasi Malaysia karena dipandang sebagai “antek kolonialisme” dan menandakan bahwa rakyat Indonesia akan membantu keadilan dan semangat patriotik, serta perlawanan yang luhur dari penduduk bangsa Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei, serta menentang usaha pembentukan Federasi Malaysia.³

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait dengan kepentingan yang dimiliki oleh Inggris dalam menjalankan kerjasama JDCD dengan Indonesia dengan Inggris yang masih tergabung menjadi bagian dari FPDA hingga saat ini. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Neorealisme, konsep Kerjasama Internasional, dan konsep Kepentingan Nasional yang dipaparkan oleh Kenneth Waltz dengan mempertimbangkan aspek *survival*, kekuasaan, keamanan, dan keuntungan relatif.

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa studi tinjauan pustaka yang berkaitan dan menunjang tema penelitian ini, yang menjadi landasan teoritis penelitian ini, antara lain:

- 1) Skripsi dengan Judul “*Perubahan Persepsi Ancaman Indonesia terhadap Eksistensi FPDA*” yang disusun oleh Gita Ardi Lestari.⁴
- 2) Skripsi dengan Judul “*Kerjasama Five Power Defence Arrangements Bagi Kepentingan Keamanan Australia Dewasa Ini*” yang disusun oleh Dien Dinasty.⁵
- 3) Thesis dengan judul “*Manfaat Joint Defence Cooperation Dialogue Britania Raya-Indonesia untuk Pertahanan Indonesia*” karya Joehendy Maharaja.⁶

² Farah Ken Cintawati, “Peranan Usman Janatin dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia 1964-1968,” skripsi., Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, Hal.37, <https://eprints.uny.ac.id/21660/>

³ *Ibid.*

⁴ Gita Ardi Lestari, “Perubahan Persepsi Ancaman Indonesia Terhadap Eksistensi FPDA,” thesis., Universitas Indonesia, 2018, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20482785&lokasi=lokal>.

⁵ Dien Dinasty, “Kerjasama Five Power Defence Arrangement Bagi Kepentingan Keamanan Australia Dewasa Ini,” skripsi., Universitas Gadjah Mada, 2016, <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93636>

⁶ Joehendy Maharaja, “Manfaat Joint Defence Cooperation Dialogue Britania Raya-Indonesia untuk Pertahanan Indonesia,” thesis., Universitas Pertamina, 1 September 2023, <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/9762?show=full>

Terdapat beberapa hipotesis yang diambil oleh peneliti berdasarkan teori Neorealisme, konsep Kerjasama Internasional, dan konsep Kepentingan Nasional, diantaranya adalah Inggris yang ingin memperoleh keuntungan dari kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia, Inggris ingin meningkatkan kapabilitas militernya, Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menyepakati kerjasama ini dengan dilihat dari latar belakang historis konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia.

2. Pembahasan

Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCD) merupakan suatu pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Inggris. Selain sebagai kerjasama bilateral, JDCD tentu memiliki beberapa hal yang menjadi arah dalam pelaksanaannya. Kegiatan JDCD ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi ruang lingkup kerjasama, memfasilitasi kerjasama industri pertahanan, merancang program kerjasama pertahanan, mengawasi implementasi program kegiatan, mengevaluasi permasalahan yang timbul, serta membuat laporan setiap pertemuan kepada Kementerian Pertahanan masing-masing.

Dalam aspek survivalitas, Inggris memiliki kepentingan lain diluar pengembangan kapasitas dan kapabilitas pertahanannya. Inggris memiliki negara-negara sekutu yang letaknya berdekatan dengan Indonesia secara geografis, seperti halnya Malaysia, Singapura, dan Australia. Melihat sejarah konfrontasi yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, Inggris hanya ingin membangun kepercayaan Indonesia terhadap eksistensi dari berbagai forum kerjasama yang dibangunnya dengan negara persemakmurnya, dalam hal ini adalah FPDA.

Jika dilihat melalui aspek kekuasaan, Inggris ingin memperluas kekuasaannya di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Upaya Inggris memperoleh kekuasaan tersebut dapat dilihat secara nyata melalui eksistensi Inggris di berbagai kawasan tersebut. Inggris mempertahankan eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Tenggara melalui berbagai kerjasama yang dijalinnya dengan negara-negara yang secara geografis berada di kawasan tersebut, seperti Indonesia.

Dengan melihat konsep kepentingan nasional terkait aspek keamanan, Inggris memiliki kepentingan terkait dengan memastikan keamanan dari negara-negara persemakmurnannya tersebut. Perspektif Neorealis berpendapat bahwa keamanan suatu negara menjadi fokus utama dalam konteks kepentingan nasional. Keamanan suatu negara didukung oleh kapasitas pertahanan yang dimiliki oleh negara tersebut.⁷ Secara geografis, baik Malaysia ataupun Singapura memiliki letak yang berdekatan dengan Indonesia. Inggris pun memanfaatkan forum JDCD sebagai salah satu upaya untuk membangun hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia dan meminimalisir kecurigaan dari Indonesia kepada negara-negara anggota FPDA yang masih terus menggelar berbagai jenis latihan gabungan tahunan.

Sesuai konsep Kepentingan Nasional yang dilihat melalui aspek keuntungan relatif, Inggris ingin melakukan kerjasama dengan Inggris dengan mempertimbangkan aspek geografis Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dan memiliki wilayah geografis yang sangat strategis, yakni berada di persilangan antara dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Australia). Dengan kondisi geografis yang demikian, menjadikan Indonesia sebagai negara strategis dalam kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki empat titik strategis yang dilalui oleh kapal-kapal perdagangan dunia. Empat titik yang dimaksud adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Empat titik strategis ini yang kemudian memungkinkan Indonesia menjadi pusat pelayaran maritim dunia.⁸

Konfrontasi Indonesia dan Malaysia

Pada tanggal 20 November 1961 Menlu Subandrio menyatakan di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa Indonesia tidak merasa keberatan ketika Malaya ingin membentuk sebuah federasi dan

⁷ Direktorat, Jenderal Potensi Pertahanan, “Peran Penting Aspek Kebijakan Pertahanan Negara”, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, (26 Agustus 2025) internet 20 Agustus 2025, <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2025/08/26/peran-penting-aspek-kebijakan-pertahanan-negara.html>

⁸ Luh Komang Wijayanti Kusumastuti, “Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia”, Institut Teknologi Bandung (1 November 2014) internet, 20 Agustus 2025, <https://itb.ac.id/berita/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia/4550>

Indonesia berharap federasi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta perdamaian dan kebebasan. Namun kemudian, terjadi perubahan sikap dari Menlu Subandrio seiring dengan tersebarnya tuduhan bahwa akan dibangun pangkalan militer negara-negara Barat di Sabah. Pada bulan September 1962 Menlu Subandrio memperingati Inggris dan Malaya bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Akan tetapi, sikap Indonesia yang menentang pembentukan Federasi Malaysia baru benar-benar menjadi keras menjelang akhir tahun itu.⁹

Penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno pada Januari 1963. Setelah Presiden Soekarno, Menteri Luar Negeri Subandrio menyampaikan kebijakan konfrontasi pada 20 Januari 1963 saat menghadiri upacara pelantikan Resimen Mahakarta. Menlu Subandrio mengungkapkan bahwa Indonesia sudah seharusnya menjalankan politik konfrontasi kepada Malaya. Indonesia menganggap Malaya sebagai kaki tangan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang sedang menjadi musuh bagi Indonesia. Malaya pada saat itu menganggap bahwa penolakan Indonesia atas pembentukan Federasi Malaysia merupakan salah satu upaya pengalihan isu terhadap kekacauan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sedang kacau pada masa itu membuat Indonesia semakin meningkatkan pengawasan dalam bidang politik untuk tetap menjamin stabilitas nasional. Ditengah kesulitan ekonomi yang terjadi, pemerintah Indonesia belum memiliki rencana yang pasti terkait program stabilitas ekonomi. Hal tersebut disampaikan oleh seorang diplomat Kedutaan Besar Amerika Serikat, yaitu James Forrestal ketika berkunjung ke Jakarta.¹⁰

3. Kesimpulan

Joint Defence Cooperation Dialogue (JDCCD) menjadi suatu forum kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan yang dimanfaatkan oleh Indonesia dan Inggris sebagai suatu wadah pengembangan kemampuan

⁹ Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI* hal.27.

¹⁰ H. Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI (Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965)* Yayasan Obor Indonesia, (Jakarta, 2007) hal. 216

masing-masing negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hingga saat ini, Inggris masih menjadi salah satu negara anggota dari Five Power Defence Arrangements (FPDA).

Ditengah mempertahankan eksistensinya, FPDA menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, diantaranya adalah terkait dengan kesadaran akan kehadiran FPDA di kawasan yang disebabkan oleh persaingan dengan ADMM-Plus dan kerjasama bilateral dengan Indonesia yang dirasa lebih memberikan dampak yang signifikan. Sikap Tiongkok terkait dengan konflik Laut Cina Selatan pun turut menjadi tantangan bagi eksistensi FPDA di kawasan. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh FPDA dalam mempertahankan eksistensinya melalui berbagai latihan militer gabungan adalah terkait dengan keterbatasan anggaran pertahanan yang dimiliki oleh negara anggotanya, diantaranya Malaysia dan Selandia Baru. Hal tersebut yang kemudian membuat kedua negara tersebut mengalami keterbelakangan dalam hal alutsista saat melakukan latihan gabungan FPDA yang juga mendukung sistem pertahanan dan keamanan masing-masing negara anggota.

Referensi

- Anwar, H. R. (2007). Sukarno, Tentara, PKI (Segitiga Kekuasaan sebelum Prahar Politik 1961-1965. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .
- Cintawati, F. K. (2013). *Peranan Usman Janatin dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1964-1968*. Retrieved from eprints.uny.ac.id: <https://eprints.uny.ac.id/21660/>
- Dinasty, D. (2016). *Kerjasama Five Power Defence Arrangements Bagi Kepentingan Keamanan Australia Dewasa Ini* . Retrieved from etd.repositry.ugm.ac.id: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93636>
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. (n.d.). *Peran Penting Aspek Kebijakan Pertahanan Negara*. Retrieved from kemhan.go.id: <https://www.kemhan.go.id/poahan/2025/08/26/peran-penting-aspek-kebijakan-pertahanan-negara.html>

- Kusumastuti, L. K. (2014, November 1). *Memiliki Empat Titik Strategis, Indonesia Mampu Menjadi Poros Maritim Dunia* . Retrieved from itb.ac.id: <https://itb.ac.id/berita/memiliki-empat-titik-strategis-indonesia-mampu-menjadi-poros-maritim-dunia/4550>
- Lestari , G. A. (2018). *Perubahan Persepsi Ancaman Indonesia Terhadap Eksistensi FPDA*. Retrieved from lib.ui.ac.id: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20482785&lokasi=lokal>.
- Maharaja , J. (n.d.). *Manfaat Joint Defence Cooperation Dialogue Britania Raya-Indonesia untuk Pertahanan Indonesia* . Retrieved from library.universitaspertamina.ac.id: <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/9762?show=full>
- Pratama , C. P., & Candra , D. S. (2014). Perkembangan Five Power Defence Arrangements dalam Menghadapi Dinamika Keamanan Asia Tenggara Pasca Perang Dingin. *Jurnal Global*, 40.
- Sundhaussen, U. (n.d.). Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI.